

TANTANGAN MODERATISME PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DARI KONSERVATISME

Oleh :

Moch. Mukhlison

moch.mukhlison89@gmail.com

Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri

Abstrak

Tantangan Moderatisme Pendidikan Agama Islam Dari Konservatisme, bukan kajian baru sebagai usaha melihat wajah baru keislaman di Indonesia, terlebih pasca reformasi. Sebagian kalangan menilai perjalanan demokrasi yang belum tuntas dianggap sebagai ladang subur pertarungan ideologi di semua level masyarakat, termasuk dunia pendidikan. Sikap negara pun dianggap menilai kebutuhan berdasarkan kepentingan politik semata, termasuk dalam skop kecil politik pengetahuan. Tulisan ini, menstudi politik pendidikan dalam konteks pertarungan ideologi moderatisme dan konservatisme dalam sekolah agama Islam. Studi dimulai melacak konteks kemunculan pendidikan Islam di Indonesia hingga saat ini. Metode yang digunakan, studi literasi berbasis dokumen ilmiah dan laporan hasil penelitian. Hasil studi ini, melihat pendidikan agama Islam di lembaga-lembaga pendidikan berideologi moderatisme sedang mengalami serangan ideologi konservatisme dari pelbagai arah. Misalnya, materi dalam bahan-bahan ajar mata pelajaran agama seperti konsep jihad dengan doktrin *amar makruf nahi munkar*. Contoh lain adalah penjelasan tentang kerajaan Bani Umayyah atau Abbasiyah. Konteks yang diperlihatkan sistem pemerintahan khilafah (kepemimpinan tunggal). Sikap pemerintah yang mencerminkan demokrasi dihilangkan. Topik-topik seperti inilah yang sangat berpotensi dijadikan gerakan konservatisme untuk mengembangkan ideologinya.

Kata Kunci: *Moderatisme, Pendidikan Islam, Konservatisme.*

Pendahuluan

Pergeseran-pergeseran wajah keislaman, juga bisa dibuktikan dalam sekolah-sekolah muslim atau Sekolah Islam. Di sekolah-sekolah Islam, peserta didik menemukan pelbagai ideologi keagamaan melalui guru atau bacaan-bacaan keagamaan. Ironisnya, beberapa kajian menunjukkan. benteng paling lemah menjaga ideologi moderatisme dengan nasionalisme adalah sekolah Islam yang diklaim sebagai sekolah moderat.¹ Sebagian besar justru gagal mempertahankan pandangan Islam moderatnya terhadap isu-isu seperti Islam dan demokrasi, Islam dan negara modern, muslim dan hubungan non-muslim, dan hak-hak warga negara.

Pergeseran ideologi tersebut tentu tidak bisa dilepaskan dengan politik pendidikan.² Kebijakan penyelenggara pendidikan untuk bertahan di tengah persaingan salah satu faktornya. Padahal, dalam sejarahnya sekolah Islam merupakan elemen pendidikan yang penting di Indonesia. Sejak berdirinya sebelum kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, sekolah Islam membuktikan sebagai sarana mencetak anak-anak didik berideologi moderatisme dengan menitikberatkan pada memahami dan mempraktekkan agama. Pada saat bersamaan pula mempromosikan sikap dan rasa nasionalisme.³

¹ Bamualim, Chaider S, Hilman Latief & Irfan Abubakar (ed), *Kaum Muda Muslim Milenia, Konservatisme, Hibridasi Identitas dan Tantangan Radikalisme* (Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah, 2018), h. 5.

² Robert W. Hefner, *Civil Islam*. Journal: *New Jersey: Princeton University Press.*/Zuhdi, Muhammad, *Menentang Muslim Moderat: Sekolah Muslim Indonesia di Tengah Konservatisme Religius* E. Journal, journal.uinjkt.ac.id diakses 4 Juli 2018, h. 73.

³ Hasan, Noorhaidi, *Islamizing Formal Education: Integrated Islamic Schools and a New Trend of Islamic Education Institution in Indonesia*. (Singapore: RSIS. 2009), h. 83.

Sejak berdirinya, hingga saat ini, jumlah sekolah Islam di Indonesia terus bertambah, negeri ataupun swasta.⁴ Fakta ini menunjukkan, politik pendidikan sekolah Islam mampu mempromosikan ajaran Islam dengan baik pada masyarakat modern. Atau sebaliknya, masyarakat modern menuntut atau memfasilitasi berdirinya sekolah-sekolah muslim. Alasannya, masyarakat modern relasi sosialnya dibangun berdasarkan kerja. Model masyarakat inilah sering menuntut adanya pemuas spiritualitas.

Sekolah muslim juga dapat dipahami sebagai lembaga sipil yang mampu menjaga kesopanan publik. Menurut Hefner, lembaga berkarakteristik seperti inilah mampu bertahan di negara demokrasi dengan penduduk mayoritas muslim. Karena, ia mampu mengembangkan model pemerintahan yang kompatibel dengan keyakinan masyarakatnya. Pandangan ini diklaim sebagai cerminan dari perkembangan situasi sosial dan politik Indonesia secara sempurna.⁵ Dibuktikan, periode terakhir 1990-an, sejumlah sarjana muslim, seperti Abdurrahman Wahid, Nurcholish Madjid, dan Dawam Rahardjo, memainkan peran penting dalam membentuk wacana Islam di Indonesia. Demikian juga, organisasi-organisasi muslim, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, sangat berpengaruh di akar rumput.

Pandangan ini, seolah menutupi perkembangan muslim konservatif. Menurut Azra, negara demokrasi sejatinya menjadi ladang subur berkembangnya muslim konservatif.⁶ Isu-isu yang ada disepakati, seperti demokrasi dan multikulturalisme,

⁴ Muhammad Zuhdi, *The 1975 Three-minister Decree and the Modernization of Indonesia Islamic Schools. American Educational History :E- Journal*, Vol. 32, No. 1, Spring 2005, h.16.

⁵ Hefner, *Civil Islam*, h. 75.

⁶ Azyumardi Azra, 'Indonesian Islam, Mainstream Muslims and Politics' (Paper presented at Taiwanese and Indonesian Islamic Leaders Exchange Project, The Asia Foundation in Taiwan, Taipei, October 26-31, 2006.), h. 8-9.

sekarang dipertanyakan dan dibantah dengan dalil-dalil agama. Lebih jauh, pembahasan hubungan agama dan negara dianggap belum selesai di Indoensia meskipun ada Pancasila. Bukti lain, perkembangan dan pertumbuhan organisasi Islam, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI), menunjukkan mampu memainkan peran penting dalam kehidupan sosial berbangsa dan bernegara.

Pelarangan HTI tidak mampu membunuh ideologinya. Sejak tahun 2017, pemerintah secara resmi melarang HTI sebagai organisasi, namun aktivis dan pengikut organisasi ini mempertahankan ideologi mereka untuk mempromosikan *khilafah* (pemerintahan Islam). Oleh karena itu, larangan HTI tidak berarti aktivis mereka tidak dapat mempromosikan ideologi mereka. Di banyak tempat, para aktivis HTI terus mempromosikan ideologi mereka kepada orang-orang muslim, dengan alasan bahwa mereka sedang berbagi ajaran agama dengan sesama muslim.⁷

Perkembangan konservatif, juga bisa dibuktikan pada perkembangan FPI. Sejak berdirinya, FPI terus tumbuh memperbanyak masanya. Puncaknya, terlihat pada 2016 yang menuntut Basuki Cahaya Purnama (Ahok), yang saat itu menjadi Gubernur Jakarta untuk turun. Dalihnya, pidato Ahok dianggap menentang Islam dan sikapnya tidak mencerminkan karakter keagamaan. Pasca kejadian itu, FPI menunjukkan wajah sejatinya, dari kelompok sosial-agama berkembang menjadi kelompok lobi untuk agenda politik. Dalam beberapa bulan terakhir, aktivis FPI mempromosikan perubahan dari pemerintah dalam pemilihan berikutnya. Diskusi dengan para pemimpin partai politik diadakan di bawah kepemimpinan FPI. Mereka mengklaim bahwa mereka mewakili suara *ummah*

⁷Zuhdi, *The 1975 three-minister decree*, h. 24.

(orang Muslim). Ini adalah apa yang disebut Van Bruinessen sebagai “belokan konservatif”⁸.

Pelepasan beberapa kontroversial fatwa (pendapat agama) Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2005, menurut Van Bruinessen adalah indikasi yang berani dari belokan konservatif. Beberapa dari mereka fatwa mencakup: fatwa tentang anti-liberalisme, sekularisme, dan pluralisme, fatwa tentang kutukan pernikahan antar agama, dan fatwa tentang sekte Ahmadiyah sebagai murtadnya Islam.⁹ Tren peningkatan Islam konservatif di Indonesia, seperti yang dijelaskan di atas, mengarah ke beberapa pertanyaan, termasuk peran pendidikan Islam. Penulisan ini dilakukan untuk menjelaskan posisi pendidikan Islam, terutama guru pendidikan agama, mengenai isu-isu terkait untuk moderat vis a vis konservatif Islam di Indonesia. Masalah yang dipilih hubungan Islam dan negara, Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM), dan Islam dan gender. Sedangkat alat ukurnya adalah dalil *amar makruf nahi munkar*, pemimpin non muslim, dan asupan informasi keagamaan.

Pendidikan Islam di Indonesia

Secara umum, pendidikan di Indonesia memiliki dua komponen dasar. Pertama, pendidikan agama sebagai subjek kurikulum. Kedua, lembaga pendidikan Islam lebih banyak menawarkan pelajaran-pelajaran agama Islam.¹⁰ Kedua komponen inilah, yang menjadi nilai tawar politik pendidikan untuk masyarakat. Di saat bersamaan pula, dua komponen dasar

⁸ Martin Van Bruinessen, *Introduction: Contemporary Developments in Indonesian Islam and the "Conservative Turn" of the Early Twenty-First Century*, in van Bruinessen (ed.) *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the "Conservative Turn"* (Singapore:ISEAS, 2013), h. 1-20.

⁹ Martin Van Bruinessen, *What Happened to the Smiling Face of Indonesian Islam? Muslim Intellectualism and the Conservative Turn in Post Suharto Era* (Singapore: RSIS. 2011), h. 56.

¹⁰ Zuhdi, *The 1975 Three-minister Decree*, h. 37.

ini menjadi arena serangan konservatisme dalam dunia pendidikan.

Kedua komponen dasar ini, dibuktikan mata pelajaran agama menjadi wajib diajarkan. Semua sekolah harus memberikan pendidikan agama kepada siswa dari agama apa pun. Dalihnya, sebagai salah satu indikator pemenuhan hak kebebasan beragama. Selain itu, pendidikan agama diyakini menjadi penjaga moral sejati yang dalam setiap ajarannya mampu menjadikan karakter siswa yang religius. Menurut Lukens-bull, semua jenis pendidikan agama di Indonesia diorientasikan menjadikan peserta didik bertakwa, beriman dan beramal saleh sesuai ajarannya.¹¹

Berdasarkan dua komponen dasar di atas, bisa dijadikan landasan untuk melihat jenis-jenis lembaga pendidikan agama Islam di Indonesia, yaitu sekolah Islam (sekolah Islam/sekolah Islam modern), madrasah (sekolah Islam), dan Pesantren (*Islamic Boarding School*). Ketiga pilah ini pun mempunyai sejarah panjang di Indonesia. Hal ini dapat dipahami sebagai cara mempertahankan ajaran-ajaran agama Islam di dunia pendidikan dari tantangan-tantangan setiap zamannya.

Awalnya, pendidikan Islam di Indonesia hanya dua jenis, (pendidikan Islam institusi) pesantren dan madrasah. Pesantren adalah sekolah asrama itu menyediakan pendidikan agama bagi siswa muslim. Ini adalah institusi pendidikan tertua di Indonesia. Lukens-bull mengamati bahwa tidak ada pendidikan formal di Indonesia sebelumnya abad ke-20, kecuali pesantren.

Tawaran pendidikan di pesantren pun hanya pendidikan agama yang lebih menekankan pembentukan moral atau akhlak. Tuntutan zaman, memaksa pesantren harus bertransformasi. Pesantren dituntut harus mengajarkan mata pelajaran yang

¹¹ Ronald A. Lukens-Bull, *A Peaceful Jihad: Javanese Islamic Education and Religious Identity Construction* (Unpublished Dissertation. Arizona State University, Arizona, USA., 1997), h. 40.

berorientasi non-agama, seperti matematika, sains, dan bahasa. Sementara itu, madrasah adalah “sekolah hari”¹² yang menyediakan lebih banyak ajaran Islam dalam kurikulumnya dibandingkan dengan sekolah berorientasi non-agama. Madrasah pertama di Indonesia dibangun pada tahun 1909 di Sumatera Barat, dikenal sebagai Madrasah Adabiyah.¹³ Namun, butuh waktu lama sebelum madrasah diakui sebagai lembaga pendidikan formal, bahkan setelah kemerdekaan Indonesia pada 1945.

Pemerintah baru mengakui keberadaannya, tahun 1975 melalui Keputusan Tiga Menteri tahun 1975 tentang Peningkatan Kualitas Islam Pendidikan. Dalam perkembangannya, pengakuan pemerintah pun dikuatkan dengan terbitnya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 1989. Bersamaan itu pula, wajah pesantren menjadi yang “disamakan” dengan pendidikan formal. Orientasi pembelajaran pun lebih banyak pada non agama. Hal ini juga disebabkan kurikulum yang dipakai adalah kurikulum pendidikan umum, karena Departemen Agama tidak mempunyai kurikulum sendiri.

Dalam perkembangannya, selain madrasah dan pesantren, ada bentuk lain dari pendidikan Islam institusi di Indonesia, yang dikenal sebagai Sekolah Islam (sekolah Islam modern). Istilah ini mengacu pada sekolah siang hari yang mengadopsi kurikulum Departemen Pendidikan, dan diperkaya dengan pendidikan agama sekolah sendiri. Secara teknis mata pelajaran agama diikutkan pada kurikulum Departemen Pendidikan. Dan sejak itu pula, Departemen Agama tidak mengawasi pendidikan agama di Sekolah Islam Modern.¹⁴

¹² Hasan, *Islamizing Formal Education*, h. 40.

¹³ Zachary Abuza, *Political Islam and Violence in Indonesia* (New York: Routledge, 2007), h. 176.

¹⁴ Lukens-Bull, *A Peaceful Jihad*, h. 47.

Pergeseran-pergeseran pengelolaan lembaga pendidikan agama Islam ini menjadi salah satu semakin terbukanya pertarungan ideologi moderatisme dengan konservatisme. Pengawasan, waktu pembelajaran agama, adanya asupan informasi agama bersumber pada media sosial mempercepat pertarungan. Munculnya, ulama-ulama gaya baru yang tidak pernah mengenyam pesantren atau tidak mempelajari agama secara mendalam juga menjadi faktor gerakan konservatisme semakin nyata.

Tantangan Islam Moderat Indonesia

Saat ini, di Indonesia pelbagai aliran mendaku sebagai Islam moderat. Akan tetapi, dalam konteks ini, penulis menyandarkan definisi Islam moderat pada pendapatnya Azra. Menurutnya, Islam moderat adalah wajah keislaman hasil kompatibilitas ajaran Islam dengan modernitas, demokrasi dan pluralitas.¹⁵ Bentuk paling sederhana dalam konteks Islam Indonesia pada pengakuan keberadaan Pancasila.

Pancasila mewakili visi negara tentang demokrasi dan pluralisme. Menurut Azra dan Hefner demokrasi yang dipraktekkan di Indonesia sesuai dengan Islam ajaran. Ini karena demokrasi Indonesia sedikit berbeda dengan negara lain. Demokrasi Indonesia bukanlah yang sekuler. Ini memungkinkan beberapa ruang bagi agama untuk mengambil yang penting bagian dan tumbuh. Tolok ukurnya, hanya tidak bertentangan dengan segala aturan di Indonesia.

Betapapun demikian, hal ini justru menjadi arena bagi kelompok konservatif memaksakan agenda Islam sebagai agenda politik nasional. Contoh paling sederhana syariatisasi hukum, mengharuskan pemimpin dari kalangan muslim dan harus laki-laki, pelarangan ideologi keagamaan, anti mainstream Islam seperti Syiah dan Ahmadiyah. Sentimen terhadap

¹⁵ Azra, *Indonesian Islam*, h. 58.

penegakan hak asasi manusia (HAM) diklaim sebagai produk agenda politik orientalisme.

Sekolah Islam di Indonesia merupakan tempat yang potensial untuk penyebaran berbagai pemikiran agama dan politik. Karena, Indonesia menempatkan ruang khusus bagi pembelajaran keagamaan. Menurut Hasan, sekolah Islam merupakan tempat untuk transmisi pengetahuan, keterampilan, dan nilai dari generasi ke generasi. Generasi, sekolah juga merupakan tempat potensial untuk mentransfer berbagai ideologi.¹⁶ Jauh lebih dari itu, Bruinessen mengidentifikasi tiga kemungkinan penyebab tren pertumbuhan agama konservatisme di Indonesia: mayoritas muslim Indonesia sebenarnya konservatif, yang para pendukung Islam moderat mengubah agenda mereka ke dalam politik dan karenanya melemahkan demokrasi, promosi Islam moderat, dan semakin berkembangnya pengaruh negara-negara timur tengah itu mempromosikan ideologi Islam yang konservatif.¹⁷

Ada dua langkah penting untuk memahami konteks dan isi agama pendidikan: kurikulum dan guru. Terlepas dari kenyataan bahwa pendidikan adalah bagian dari kabupaten kebijakan otonom, kurikulum pendidikan di Indonesia sangat terpusat. Pemerintah, baik Kementerian Pendidikan dan Departemen Agama mengembangkan kurikulum untuk semua tingkat sekolah. Implementasi kurikulum yang sukses, bagaimanapun, sangat bergantung pada guru. Ada dua kondisi guru yang berbeda dalam hal supervisor mereka. Guru dari pendidikan agama sebagian besar milik Kementerian Agama (terpusat), sedangkan guru mata pelajaran lain milik pemerintah kabupaten atau provinsi.

¹⁶ Hasan, *Islamizing Formal Education*, h. 90.

¹⁷ Bruinessen, *What Happened*, h. 147.

Moderatisme vs Konsevatisme dalam Pendidikan Islam di Indonesia

a. Kurikulum Pendidikan Islam

Hingga dewasa ini, kurikulum pendidikan Islam belum mendapatkan perhatian penuh oleh pemerintah. Betapapun, dalam sejarahnya, pendidikan agama Islam telah berdiri sebelum kemerdekaan. Sumbangsihnya pun tidak bisa diragukan. Semangat perjuangan, hingga pembentukan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia.

Secara sederhana, ada dua bentuk kurikulum pendidikan di Indonesia, [1] kurikulum pendidikan Islam, dan [2]. Apabila mengikuti logika pemerintah, Pendidikan Agama Islam mengalami penyederhanaan melalui Keputusan Tiga Menteri tahun 1975 tentang Pendidikan Islam. Akibatnya, isi kurikulum pendidikan Islam di madrasah dibagi menjadi lima mata pelajaran saja: Quran-Hadits (al-quran dan al-qur'an hadist nabi), Akidah dan Akhlak (teologi dan moralitas), Fiqh (hukum Islam), Sejarah Islam, dan bahasa Arab. Kelima mata pelajaran tersebut, wajib dilalui oleh peserta didik mulai tingkat dasar (*madrasah ibtidaiyah*) hingga tingkat atas, (*madrasah aliyah*).

Pembaharuan peraturan pun tidak mengubah mata pelajaran ini semua. Peraturan terbaru tentang kurikulum madrasah adalah Keputusan Menteri Agama Nomor 165, tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 di Jakarta subjek Pendidikan Agama Islam di madrasah. Di sekolah reguler, pendidikan Islam dikompres menjadi satu mata pelajaran, yang disebut Pendidikan Agama Islam. Oleh karena itu, meski hanya ada satu mata pelajaran dalam regular sekolah, dibandingkan dengan lima mata pelajaran di madrasah, ada empat sub-bagian mata pelajaran, yang hampir mirip dengan isi kurikulum madrasah: Quran-Hadits (al quran dan al-Qur'an hadist), Akidah dan Akhlak (teologi dan moralitas), Fiqh (hukum Islam), dan Sejarah Peradaban Islam (*the history of islamic civilization*).

Menurut Zuhdi, kelima subjek tersebut mewakili kompleksitas ajaran Islam. Mata pelajaran ini memperkenalkan prinsip, elaborasi dan praktek ajaran Islam dari dasar hingga ke muka sesuai tingkatan sekolah. Kurikulum pendidikan agama terus menjelaskan detail inti dan dasar kompetensi pendidikan agama dan membimbing para guru untuk menyiapkan rencana pelajaran mereka. Kurikulum juga memberikan penjelasan rinci kepada guru tentang masing-masing kompetensi.

Di balik kemajuannya, banyak penelitian menunjukkan ada beberapa potensi penyebaran pesan-pesan radikalisi kurikulum pendidikan agama. Zainiyati, misalnya, mengeksplorasi kurikulum pendidikan Islam melalui perspektif radikalisasi. Dia menemukan bahwa sejumlah topik di kurikulum berpotensi menyebabkan siswa akan memiliki pandangan radikal. Topik-topik seperti *khilafah* (muslim ummah di bawah kepemimpinan tunggal) dan jihad (semangat pertempuran). Topik *khilafah* ini, memang tidak eksplisit, akan tetapi bagaimana penjelasan tentang sejarah kerajaan-kerajaan Islam berdiri. Sistem monarki absolut dengan kepemimpinan tunggal sangat berpotensi menyemai paham *khilafah*.

Jihad pun begitu. Jihad bisa dipahami sebagai pertempuran melawan mereka yang “*bathi*’ atau kafir atau murtad. Pesan kuatnya, menegakkan yang baik (*makruf*) dan melawan kemunkaran. Betapapun dasar keagamaannya kuat, akan tetapi kewenangan melakukan berdasarkan prinsip-prinsip *kemaslahatan* umat tidak tersampaikan dengan baik. Prinsip dasarnya, sederhananya memaknai jihad akan membuat disharmoni siswa dengan keyakinan atau agama lain semakin menganga. Hal ini sangat berpotensi melakukan tindakan-tindakan kriminal.¹⁸

¹⁸ Zainiyati, H. S. ‘Curriculum, Islamic understanding and radical Islamic movements inIndonesia (Journal of Indonesian Islam, Vol.10. 02, December 2016), h. 83.

Demikian pula, penelitian Hasniati pada buku-buku pendidikan Islam di sekolah menengah. Dia menemukan bahwa semua buku teks yang diamati mengandung teks-teks ambigu yang dapat ditafsirkan sebagai salah satu dari keduanya moderat atau konservatif. Buku-bukunya mengandung pesan yang toleran maupun tidak toleran. Selain itu, ia juga menemukan bahwa beberapa pesan radikal secara eksplisit dinyatakan dalam buku teks. Misalnya, ada sebuah hadits yang mengatakan: *“anda yang melihat munkar (perilaku yang salah) harus bisa untuk mengubahnya dengan tangan mereka. Jika tangan tidak memungkinkan, maka mereka harus menggunakan mulut mereka. Jika mulut juga tidak bisa bekerja, maka paling tidak gunakan hatimu, dan itu adalah bentuk keyakinan terlemah ”*.

Menurut Hasniati, jika guru memahami dan menjelaskan makna tekstual dari hadits tanpa lebih lanjut penjelasan tentang konteks, maka siswa akan belajar bahwa mereka harus menggunakan kekuatan fisik mereka (tangan) untuk mengubah perilaku buruk orang, karena itu lebih baik dari pada menggunakan mulut atau hanya diam-diam mengutuk dalam hati. Ini akan semakin menciptakan masyarakat yang kacau balau karena orang akan menjadi polisi yang baik melakukan pada orang lain. Sementara itu standar antar kelompok orang mungkin berbeda.¹⁹

Keputusan Menteri Pendidikan No. 21 tahun 2016 membakukan isi kurikulum semua mata pelajaran dan untuk semua tingkat sekolah, termasuk pelajaran Pendidikan Agama. Standar ini secara eksplisit menyebutkan empat sub-divisi dari isi pendidikan agama di sekolah umum (Peraturan Menteri Pendidikan No.21/2016). Perbedaan lain antara pendidikan

¹⁹ Hasniati, *Analisis Muatan Radikalisme pada Buku Teks Pendidikan Agama Islam (PAI) SMA (Analysis of the Contents of raDicalism in the Text Books of Islamic Education for Highschool)*. (Thesis submitted to the Faculty of Education, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia 2017), h. 43.

agama di madrasah dan sekolah umum adalah waktu yang dialokasikan. Waktu yang dialokasikan untuk pendidikan agama di madrasah adalah dua jam untuk masing-masing subjek atau sekitar 10 jam per minggu. Sementara itu, pendidikan agama di sekolah umum dialokasikan hanya untuk tiga jam per minggu. Hal ini tentu tidak mengherankan karena madrasah adalah sekolah yang berorientasi agama, dan oleh karena itu adalah normal untuk memiliki kurikulum pendidikan agama yang lebih tinggi. Ada dua fitur penting yang saya ingin tonjolkan tentang agama kurikulum pendidikan di Indonesia: tujuan dan isi.

1. Tujuan

Tujuan utama pendidikan agama di Indonesia adalah menanamkan keyakinan agama dan agama memperkuat nilai-nilai agama dan praktek di antara orang-orang percaya dari setiap agama. Tujuan ini jelas diamanatkan oleh UU Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa “nasional pendidikan... bertujuan untuk mengembangkan potensi anak-anak menjadi manusia yang setia dan taat kepada Tuhan, dengan perilaku moral yang baik, sehat, berpengetahuan luas, cerdas, kreatif, independen, dan bertanggung jawab serta warga negara yang demokratis ”.²⁰ Karena penyerahan kepada Tuhan adalah bagian dari tujuan pendidikan nasional, pendidikan agama dirancang untuk menanamkan iman kepada anak-anak.

Betapapun begitu ideal tujuan-tujuan itu, perlu dicatat, terlepas dari fakta bahwa muslim adalah mayoritas, Indonesia mengakui agama yang berbeda, dan pendidikan agama harus diberikan sesuai dengan siswa keyakinan. Indonesia mengakui enam keyakinan agama dan tradisi berbeda: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konfusianisme. Sementara umat Islam merupakan mayoritas dari populasi, Islam bukan satu-satunya agama resmi. Konstitusi memberikan hak yang sama

²⁰ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 21 tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.

untuk setiap orang warga negara terlepas dari keyakinan agama mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa Indonesia adalah multi-agama.

2. Konten

Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014 dan Menteri Peraturan Pendidikan No. 21 Tahun 2016 memberikan panduan lengkap tentang cakupan dan isi pendidikan agama di madrasah dan sekolah umum. Umumnya, ada dua perbedaan utama di antara keduanya.²¹ Yang pertama adalah bahwa subjek pendidikan agama di madrasah dikategorikan menjadi lima (5) subjek yang berbeda, sementara di sekolah umum hanya mengenali satu mata pelajaran agama. Itu kedua adalah waktu yang dialokasikan untuk pendidikan agama di madrasah adalah empat hingga lima kali lebih banyak dari itu di sekolah umum.

Sementara ada perbedaan volume dan waktu-beban, isi pendidikan Islam di Indonesia madrasah dan sekolah umum terkait erat. Perbedaan utama dalam hal konten adalah bahasa Arab, yang tidak diajarkan di sekolah umum. Umumnya, isi islami pendidikan di madrasah berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 165 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

[1] Al-Qur'an-Hadits adalah subjek yang memperkenalkan siswa ke sumber-sumber dasar ajaran Islam dan nilai-nilai. Al-Quran dan Hadits meletakkan dasar pada akidah (prinsip-prinsip Islam keyakinan), akhlak (prinsip dan praktek perilaku moral Islam), dan syariah atau fikih (hukum Islam),

[2] Akidah-Akhlak adalah subjek gabungan dari keyakinan dasar Islam dan perilaku moral. Akidah adalah tentang prinsip keyakinan Islam. Perilaku muslim yang diatur dalam syariah atau fikih dan akhlak didasarkan pada akidah,

²¹ Keputusan Meteri Agama RI No. 165 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah.

yang berarti bahwa keyakinanlah yang mendorong muslim untuk bertindak sesuai dengan syariah dan akhlak.

[3] Fikih adalah sistem atau seperangkat peraturan yang mengontrol hubungan antara manusia-makhluk kepada Allah, manusia lain, dan makhluk lain.

[4] Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) atau Sejarah dan Kebudayaan Islam adalah catatan perkembangannya kehidupan muslim dari waktu ke waktu. Ini menunjukkan cara orang muslim berdoa, berinteraksi, berlatih perilaku moral mereka, mengembangkan sistem sosial, dan menyebarkan keyakinan agama mereka dan praktek di seluruh dunia.

[5] Bahasa Arab adalah media penting untuk memahami ajaran Islam membentuk sumber aslinya. Dengan bahasa, orang dapat belajar Islam langsung dari al-Qur'an, hadits, dan buku referensi lainnya yang mengeksplorasi lebih jauh penjelasan tentang Islam ajaran, seperti tafsir (al-Qur'an eksegesis) dan syarah hadist (penjelasan hadist).

Penutup

Pendidikan agama khususnya Islam menjadi kebutuhan penting dalam dunia pendidikan. Sejalan dengan perkembangan zaman dengan tuntutananya, Pendidikan agama Islam harus memasuki ranah politik pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan diharuskan mempertahankan secara konten dan kebutuhan masyarakat modern. Kompleksitas inilah yang membawa semakin terlihat nyata pertarungan ideologi moderatisme dengan konservatisme.

Pertarungan ideologi moderatisme dengan konservatisme terjadi di dalam lembaga pendidikan. Bukti paling mudah dilihat, konten-konten sumber bahan pembelajaran agama Islam. Meskipun juga terdapat dalam tujuan pendidikan agama Islam secara umum. Doktrin jihad dan tata kehidupan sosial

berdasarkan pandangan Islam mutlak menjadi salah satu pokok bahasan dengan mengenyampingkan konteks historisnya.

Problem dasar tumbuh kembangnya gerakan konservatisme adalah konsistensi ideologi moderatisme dengan pola, strategi dan bahan pembelajaran agama Islam di lingkungan dunia pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan harus mempunyai pemahaman yang sama tentang terjadinya pertarungan ideologi moderatisme dan konservatisme dalam dunia pendidikan



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hamdi, Ridho. *'The Jakarta Charter in Post-Soeharto Indonesia: Political Thoughts of the Elites in Muhammadiyah.'* *Masyarakat Indonesia*, 41 (1), June 2015.
- Arakaki, Robert K. *Religion and State Building in Colonial Post-colonial Southeast Asia: A Comparative Analysis of State-building Strategies in Indonesia and Malaysia. Unpublished Ph.D Dissertation at the University of Hawai'i, Hawai'i, USA. 2004.*
- Azra, Azyumardi. *'Indonesian Islam, Mainstream Muslims and Politics'. Paper Presented at Taiwanese and Indonesian Islamic Leaders Exchange Project, The Asia Foundation in Taiwan, Taipei, October 26-31, 2006.*
- _____. *'The Rise of Islamic Populism: Challenge to Civil Islam in Indonesia.'* *Presentation at the Conference Civil Islam Revisited: Indonesia and Beyond.* Singapore, 2017.
[https://ari.nus.edu.sg/Assets/repository/files/events/Program_Civil%20Islam\(2\).pdf](https://ari.nus.edu.sg/Assets/repository/files/events/Program_Civil%20Islam(2).pdf)
- Barkin, Gareth. *'Commercial Islam in Indonesia: How Television Producers Mediate Religiosity among National Audiences.'* *International Journal of Asian Studies*, 11/1, 2014.
- Bruinessen, Martin Van. *'Introduction: Contemporary Developments in Indonesian Islam and the "Conservative Turn" of the Early Twenty-First Century', in van Bruinessen (ed.) Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the "Conservative Turn".* Singapore: ISEAS. Pp. 2013
- _____. *What Happened to the Similing Face of Indonesian Islam? Muslim Intellectualism and the Conservative Turn in post Suharto Era.* Singapore: RSIS, 2011.

- Gunaratna, Rohan. *Global Threat Forecast. Counter Terrorist Trends and Analyses: A Journal of the International Centre for Political Violence and Terrorism Research*, 10/1, RSIS Singapore, 2018.
- Hasan, Noorhaidi. *Islamizing Formal Education: Integrated Islamic Schools and a New Trend of Islamic Education Institution in Indonesia*. Singapore: RSIS, 2009.
- Hasniati. *Analisis Muatan Radikalisme pada Buku Teks Pendidikan Agama Islam (PAI) SMA (Analysis of the Contents of Radicalism in the Text Books of Islamic Education for Highschool)*. Thesis Submitted to the Faculty of Education, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia, 2017.
- Hasyim, Syafiq. 'State and Religion: Considering Indonesian Islam as Model of Democratisation for the Muslim World,' Paper Prepared for the Colloquium on Models of Secularism, hosted by the Friedrich Naumann Stiftung, Berlin, July 31, 2013.
- Hefner, Robert W. *Civil Islam*. New Jersey: Princeton University Press. 2000.
- Keputusan Meteri Agama RI No. 165 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah
- Lukens-Bull, Ronald A. *A Peaceful Jihad: Javanese Islamic Education and Religious Identity Construction. Unpublished Dissertation. Arizona State University, Arizona, USA, 1997.*
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 21 tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah).